

INFLASI: TEORI DAN KEBIJAKAN

Arko Pujadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jayabaya
arkopujadi@yahoo.com

ABSTRAK

Inflasi atau kenaikan harga secara umum, menjadi salah satu isu ekonomi makro yang populer di tengah masyarakat, mengingat dampaknya yang sangat luas dan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Inflasi mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Artinya, dengan pendapatan yang tetap, kenaikan harga akan mengakibatkan jumlah barang yang bisa dibeli menjadi berkurang. Dalam kontke yang lebih luas, inflasi yang tidak terkendali akan meredistribusi pendapatan, dimana kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan dipaksa untuk mensubsidi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Tulisan ini mengupas fenomena inflasi secara ringkas dalam ruang lingkup teori dan kebijakan pengendaliannya.

PENDAHULUAN

Di samping pertumbuhan ekonomi dan pengangguran, inflasi merupakan isu besar dan populer dalam perekonomian makro, terkait dengan dampaknya yang sangat luas dan terasa langsung dalam kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, inflasi pernah mencapai 650% pada tahun 1965 yang dipicu oleh pencetakan uang baru untuk membiayai konfrontasi dengan Malaysia. Di puncak krisis ekonomi tahun 1998, inflasi sempat mencapai 77,63% (BPS). Kini inflasi relatif dapat dikendalikan. Sepanjang pemerintahan Joko Widodo, inflasi rata-rata hanya 3% setahun (Januari 2015 sampai Juni 2022), dengan inflasi tertinggi 3,61% pada tahun 2017 dan terendah 1,68% pada tahun 2020 (BPS). Sejak Indonesia merdeka, ini merupakan inflasi terendah dalam satu masa pemerintahan.

PEMBAHASAN

Definisi dan Ragam Inflasi

Per definisi, inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Makna kata kecenderungan merujuk pada pengertian inflasi sebagai realitas, bukan sebagai angka-angka di atas kertas (*suppressed inflation*). Secara umum artinya bukan kenaikan harga dari satu atau dua macam barang/jasa saja, melainkan kenaikan harga-harga dari sebagian besar barang/jasa. Sedangkan terus-menerus dalam arti kenaikan harga tersebut merambat dari waktu ke waktu, tidak temporer atau seketika. Kebalikan dari inflasi adalah deflasi, yaitu penurunan harga secara umum, disebut juga inflasi negatif.

Inflasi dapat diukur dengan dua cara sebagai berikut:

1. Menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK)

Indeks Harga Konsumen mengukur rata-rata perubahan harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi secara massal oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHK}_t - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\%$$

2. Menggunakan Deflator Produk Domestik Bruto (PDB)

Deflator PDB mengukur rasio PDB nominal (berdasarkan harga berlaku) dalam ukuran nyata (berdasarkan harga tetap).

$$\text{Deflator PDB} = \frac{\text{PDB Nominal}}{\text{PDB Nyata}} \times 100$$

Mengukur inflasi dengan menggunakan deflator PDB berarti mengukur perubahan harga dari seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh perekonomian.

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{Df}_{(t)} - \text{Df}_{(t-1)}}{\text{Df}_{(t-1)}} \times 100\%$$

Inflasi dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Berdasarkan besarnya:
 - a. Kurang dari 10% setahun, disebut inflasi ringan

- b. Antara 10% sampai 30% setahun, disebut inflasi sedang
- c. Antara 30% sampai 100% setahun, disebut inflasi berat
- d. Lebih dari 100% setahun, disebut hiperinflasi.

Meskipun demikian, penentuan parah/tidaknya inflasi perlu mempertimbangkan kelompok masyarakat yang menanggung dampaknya. Inflasi 20% misalnya, jika dampaknya terutama dirasakan oleh kelompok penduduk berpendapatan rendah, sepatutnya disebut inflasi berat.

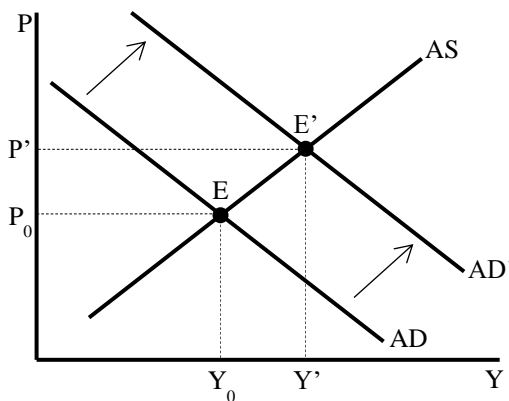
2. Berdasarkan sumbernya:

- a. Inflasi domestik (*domestic inflation*), yaitu inflasi yang sumbernya berasal dari dalam negeri. Inflasi domestik terjadi jika defisit anggaran pemerintah dibiayai dengan mencetak uang baru, gagal panen, atau faktor lain yang sumbernya dari dalam negeri.
- b. Inflasi yang diimpor (*imported inflation*), yaitu inflasi yang diimpor dari luar negeri melalui perdagangan antar negara. Penularan inflasi dari luar negeri terjadi melalui kenaikan harga barang/jasa impor.

3. Berdasarkan penyebabnya:

- a. Inflasi permintaan (*demand-pull inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan permintaan agregat (*aggregate demand*).

Secara teoritis, inflasi permintaan dapat dijelaskan sebagai berikut:



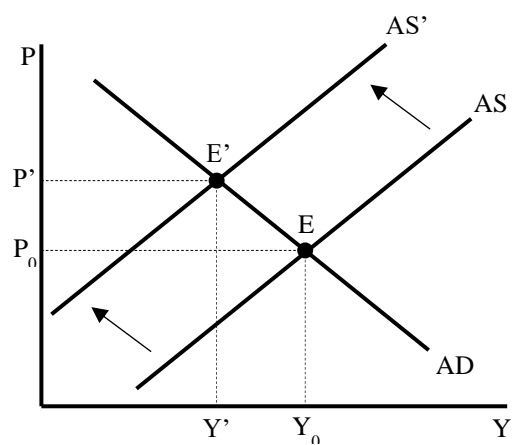
Gambar 1.1
Inflasi Permintaan

Keseimbangan mula-mula di E, pada tingkat harga, P_0 dan output, Y_0 . Kenaikan permintaan agregat mengakibatkan kurva permintaan agregat (AD) bergeser ke kanan menjadi AD' . Keseimbangan yang baru tercipta di E' , dimana harga naik dari P_0 menjadi P' (inflasi),

sedangkan output naik dari Y_0 menjadi Y' . Pada kasus inflasi permintaan, kenaikan harga output (P) diiringi dengan kenaikan jumlah output (Y) yang dihasilkan. Pada giliran berikutnya, kenaikan harga output (P) juga akan mengakibatkan kenaikan harga input akibat dari kenaikan permintaan input yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah output.

- b. Inflasi biaya (*cost-push inflation*), yaitu inflasi yang disebabkan oleh penurunan penawaran agregat (*aggregate supply*).

Secara teoritis, inflasi biaya dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.2
Inflasi Biaya

Keseimbangan mula-mula di E, pada tingkat harga, P_0 dan output, Y_0 . Kenaikan biaya produksi mengakibatkan kurva penawaran agregat (AS) bergeser ke kiri menjadi AS' . Keseimbangan yang baru tercipta di E' , dimana harga naik dari P_0 menjadi P' (inflasi), sedangkan output turun dari Y_0 menjadi Y' . Pada kasus inflasi biaya, kenaikan harga output (P) diiringi dengan penurunan jumlah output (Y) yang dihasilkan. Dalam hal ini, kenaikan harga output (P) didahului dengan kenaikan harga input yang mengakibatkan kenaikan biaya produksi.

Dampak Inflasi

Dampak inflasi tergantung pada apakah inflasi tersebut dapat diantisipasi secara sempurna atau tidak.

- a. Inflasi yang diantisipasi sempurna

Anggaplah suatu perekonomian telah berpengalaman dengan tingkat inflasi 5%, maka semua kontrak akan ditetapkan dengan tingkat inflasi yang diharapkan, yaitu sebesar 5%. Dalam hal ini inflasi tidak menimbulkan biaya riil,

kecuali meningkatkan biaya memegang uang, sehingga menurunkan permintaan uang, dan meningkatkan biaya untuk konsumsi makanan (*menu cost inflation*).

b. Inflasi yang diantisipasi tidak sempurna

Dalam hal ini, kebanyakan kontrak akan dibuat dengan nilai-nilai nominal. Jika inflasi tidak diharapkan tinggi tetapi nyatanya tinggi, maka peminjam akan mengembalikan pinjaman dalam jumlah uang yang lebih murah (daya belinya lebih rendah). Sebaliknya jika inflasi tidak diharapkan rendah tetapi nyatanya rendah, maka peminjam akan mengembalikan pinjaman dalam jumlah uang yang lebih mahal (daya belinya lebih tinggi).

Dalam konteks yang lebih luas, inflasi akan mengakibatkan redistribusi pendapatan, dimana kelompok masyarakat berpendapatan berpendapatan rendah akan dipaksa untuk mensubsidi kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Mengapa hal yang demikian dapat terjadi? Inflasi pertama-tama akan mengakibatkan penurunan daya beli dari pendapatan yang diterima masyarakat. Artinya, dengan pendapatan yang tetap, kenaikan harga akan mengakibatkan jumlah barang yang bisa dibeli menjadi berkurang. Bagi kelompok masyarakat yang bisa menuntut kenaikan upahnya, dampak inflasi menjadi tidak berarti, karena diimbangi dengan kenaikan upahnya. Sementara bagi kelompok masyarakat lain yang tidak dapat segera menaikkan upahnya (disebut juga kelompok berpendapatan tetap yang biasanya merupakan kelompok berpendapatan rendah), inflasi akan langsung memukulnya menjadi lebih miskin daripada sebelumnya.

Anggaplah pendapatan nasional yang disebut Produk Domestik Bruto (PDB) sebagai seloyang kue yang dibagi diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Inflasi akan mengakibatkan pola pembagian kue tersebut menjadi berubah. Kelompok masyarakat berpendapatan tetap akan memperoleh bagian kue yang lebih kecil daripada sebelum inflasi, karena penurunan daya belinya. Padahal kue yang dibagi tetap seloyang, sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang bagian kuenya jadi lebih kecil, pasti ada kelompok masyarakat lain yang bagian kuenya jadi lebih besar. Kelompok masyarakat itu tentu saja bukan yang berpendapatan tetap, melainkan kelompok masyarakat yang bisa menuntut kenaikan pendapatan tadi, yang pada umumnya merupakan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Dengan kata lain, inflasi akan mengakibatkan redistribusi pendapatan, dari kelompok masyarakat berpendapatan rendah kepada kelompok masyarakat berpendapatan tinggi. Atau meminjam Rhoma Irama, inflasi akan mengakibatkan yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin.

Teori Inflasi

Paling tidak terdapat tiga teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi dan proses terjadinya inflasi.

1. Teori Neoklasik

Menurut teori ini ada dua faktor penyebab terjadinya inflasi, yaitu:

1) Jumlah Uang Beredar (JUB)

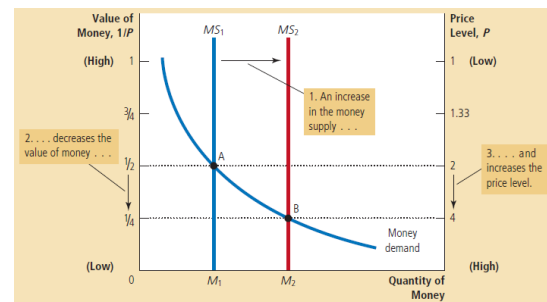
Pengaruh jumlah uang beredar terhadap inflasi dijelaskan melalui persamaan Kuantitas Uang yang dikembangkan oleh Irving Fisher (1911), sebagai berikut:

$$MV = PT$$

dimana: M = jumlah uang beredar (*money*); V = kecepatan peredaran uang (*velocity of money*); P = tingkat harga (*price*); dan T = volume transaksi (*transaction*).

T dianggap tetap karena selalu berada dalam *full-employment*. Demikian pula V, selama tidak ada perubahan dalam kebiasaan melakukan pembayaran. Sehingga, hanya M dan P yang bisa berubah, dimana P akan naik (inflasi) jika M naik.

Pengaruh jumlah uang beredar (JUB) terhadap inflasi dijelaskan melalui gambar berikut ini.



Gambar 1.3
Pengaruh JUB terhadap Harga

Tambahan JUB menggeser kurva penawaran uang ke kanan dari MS₁ ke MS₂. Keseimbangan bergerak dari titik A ke titik B. Nilai uang (sumbu kiri) menurun dari 1/2 menjadi 1/4, dan tingkat harga (sumbu kanan) meningkat dari 2 menjadi 4. Dengan kata lain, tambahan JUB mengakibatkan kenaikan harga (inflasi) dan penurunan nilai uang (daya beli uang).

2) Ekspektasi (harapan) masyarakat terhadap kenaikan harga-harga (inflasi) di waktu mendatang.

Kemungkinannya adalah sebagai berikut:

- Jika harga diespektasi tidak naik maka tambahan JUB yang diterima masyarakat

tidak dibelanjakan sehingga tidak menimbulkan kenaikan permintaan agregat dan harga-harga (tidak terjadi inflasi).

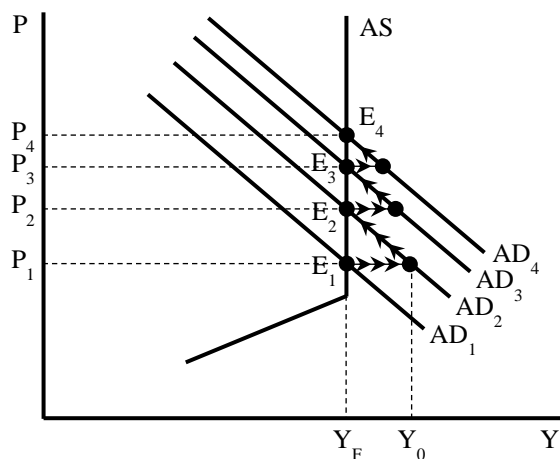
- Jika harga diekspektasi akan naik maka tambahan JUB yang diterima masyarakat akan dibelanjakan sehingga menimbulkan kenaikan permintaan agregat dan harga-harga (terjadi inflasi).
- Jika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap nilai uang maka masyarakat enggan menyimpan uang, seberapa uang yang ada akan dibelanjakan, sehingga menimbulkan hiperinflasi.

2. Teori Keynes

Menurut Keynes, inflasi terjadi melalui proses perebutan output diantara kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat. Proses tersebut terjadi melalui:

- Pemerintah yang membiayai kenaikan belanja barangnya dengan mencetak uang baru.
- Pengusaha yang membiayai kenaikan pengeluaran investasinya dari kredit bank.
- Pekerja yang menuntut kenaikan gaji melebihi produktivitas mereka.

Gambar 1.4 menjelaskan proses perebutan tersebut yang berakhir dengan kenaikan harga (inflasi).



Gambar 1.4
Proses Inflasi menurut Keynes

Keseimbangan mula-mula di E_1 pada harga, P_1 dan output *full-employment*, Y_F . Misalkan pemerintah menaikkan pengeluarannya dengan mencetak uang baru. Akibatnya, kurva AD_1 bergeser ke AD_2 , menimbulkan senjang inflasi (*inflationary gap*) sebesar $Y_F Y_0$. Perekonomian mengarah ke keseimbangan baru di E_2 , pada harga yang lebih tinggi di P_2 (inflasi). Ini merupakan tahap 1, dimana:

$G \uparrow \rightarrow AD_1 \text{ ke } AD_2 \rightarrow IG = Y_F Y_0 \rightarrow E_1 \text{ ke } E_2 \rightarrow P_1 \text{ ke } P_2$

Karena output sudah *full-employment*, tambahan output yang diperoleh pemerintah hanya dapat terjadi dengan cara merebut bagian output dari kelompok lain melalui kenaikan harga. Jika kelompok lain, misalnya pengusaha, ingin merebut kembali bagian outputnya yang berkurang dengan meningkatkan pengeluaran investasinya. Pada tahap 2 ini: $I \uparrow \rightarrow AD_2 \text{ ke } AD_3 \rightarrow E_2 \text{ ke } E_3 \rightarrow P_2 \text{ ke } P_3$

Berikutnya, jika pekerja menuntut upah yang lebih tinggi agar dapat meningkatkan konsumsinya yang jadi berkurang karena kenaikan harga. Ini menjadi tahap 3, dimana: $C \uparrow \rightarrow AD_3 \text{ ke } AD_4 \rightarrow E_3 \text{ ke } E_4 \rightarrow P_3 \text{ ke } P_4$

Proses perebutan output itu terus berlangsung dengan senjang inflasi yang semakin mengecil. Keseimbangan baru akan tercipta dengan harga yang lebih tinggi tanpa merubah output.

3. Teori Strukturalis

Disebut teori inflasi jangka panjang, karena menekankan faktor struktural sebagai akar inflasi yang terjadi di negara sedang berkembang. Faktor tersebut berupa:

- 1) Penerimaan ekspor yang rendah mengakibatkan kelangkaan devisa sehingga menghambat impor bahan baku dan barang modal. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, industri substitusi impor dikembangkan. Namun biaya produksinya mahal sehingga harga jual produknya juga ikut mahal (inflasi).
- 2) Pertumbuhan pasok bahan pangan yang lambat tidak mampu mengimbangi pertumbuhan permintaannya sehingga harganya relatif mahal. Para pekerja menuntut kenaikan upah sehingga menimbulkan kenaikan biaya produksi dan kenaikan harga barang-barang (inflasi).

Kebijakan Pengendalian Inflasi

1. Kebijakan Moneter

Sebagai pelaksana kebijakan moneter, Bank Sentral (BS) memiliki tiga instrumen untuk menekan inflasi melalui pengurangan JUB.

- 1) Operasi Pasar Terbuka (*open market operations*)
BS jual/beli surat berharga kepada Bank Umum (BU). JUB dikurangi dengan cara menjual surat berharga yang dimiliki/diterbitkan BS.
- 2) Tingkat bunga diskonto (*discount rate*)
Tingkat bunga diskonto merupakan tingkat bunga untuk pinjaman dari BS kepada BU. JUB yang berasal dari pinjaman kepada BU dikurangi dengan cara menaikkan tingkat bunga diskonto.

3) Rasio cadangan wajib (*required-reserve ratio*)

Di Indonesia disebut Giro Wajib Minimum (GWM) yaitu dana atau simpanan minimum yang harus disetorkan oleh bank ke BI dalam bentuk saldo rekening giro. GWM merupakan sebagian simpanan di BU yang tidak boleh dipinjamkan. Dengan menaikkan rasio cadangan wajib, JUB dapat dikurangi.

2. Kebijakan Fiskal

Sebagai pelaksana kebijakan fiskal, pemerintah memiliki dua instrumen untuk berperan dalam mengendalikan inflasi.

1) Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*)

Pengurangan pengeluaran pemerintah akan menurunkan permintaan agregat, sehingga dapat meningkatkan tekanan terhadap inflasi.

2) Tarif pajak (*tax rate*)

Kenaikan tarif pajak akan mengurangi pengeluaran konsumsi masyarakat, sehingga menurunkan permintaan agregat dan meningkatkan tekanan terhadap inflasi.

3. Kebijakan Sektor Riil

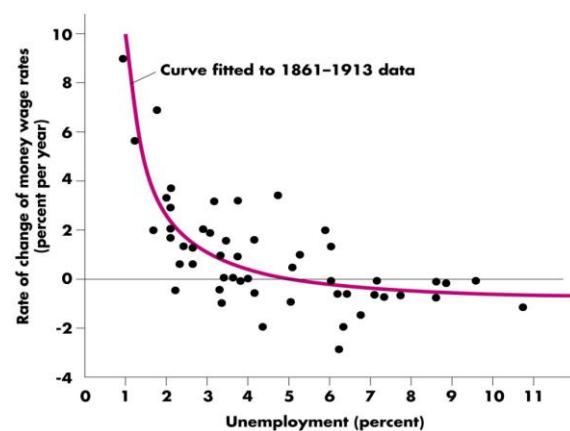
Jika kebijakan moneter dan fiskal mengendalikan inflasi dari sisi permintaan, maka kebijakan sektor riil bekerja dari sisi penawaran. Sasarannya adalah menjamin agar barang/jasa tersedia dalam jumlah yang cukup dan mudah dijangkau, sehingga tidak menimbulkan gejolak harga. Termasuk dalam kebijakan sektor riil, antara lain:

- Meningkatkan kapasitas produksi nasional: investasi, infrastruktur, pajak/subsidi, tingkat upah.
- Mengamankan distribusi barang: badan penyangga, transportasi, operasi pasar
- Kebijakan harga: BBM, listrik

- Kebijakan perdagangan luar negeri: ekspor dan impor

PENUTUP

Berdasarkan data upah di Inggris selama kurun waktu 1861 hingga 1957, A.W. Phillips (1958) menemukan bahwa tingkat pengangguran berhubungan secara berkebalikan dengan kenaikan upah nominal. Dengan kata lain, ada *trade-off* antara inflasi dengan pengangguran. Implikasi dari temuan ini memberikan pilihan bagi pembuat kebijakan untuk mencapai pengangguran yang rendah dengan membiarkan inflasi tinggi, atau memelihara inflasi yang rendah sambil menghadapi pengangguran yg tinggi.



Gambar 1.5
Hubungan antara Tingkat Pengangguran dan Tingkat Perubahan Upah Nominal

RUJUKAN PUSTAKA

- Boediono (2018). *Ekonomi Makro*, Ed. 4. Yogyakarta: BPFE
- [Dornbusch](#), Rudiger. [Stanley Fischer](#), [Richard Startz](#) (2010). *Macroeconomics*, 11th Edition. New York: McGraw-Hill/Irwin.
- Mankiw, Gregory N. (2018). *Macroeconomics, Tenth Edition*. Worth Publishers.